

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA BANDAR
LAMPUNG: STUDI KUALITATIF TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK**

(Tugas Ujian Tengah Semester)

Oleh:

NISRINA LATHYFA MAHARANI

NPM 2416041071



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	<i>i</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah.....	<i>6</i>
1.3 Tujuan Penelitian	<i>7</i>
1.4 Manfaat Penelitian	<i>7</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<i>9</i>
2.1 Penelitian Terdahulu	<i>9</i>
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik.....	<i>11</i>
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	<i>11</i>
2.2.2 Tujuan Kebijakan Publik.....	<i>12</i>
2.3 Tinjauan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik	<i>12</i>
2.3.1 Definisi Partisipasi Masyarakat.....	<i>12</i>
2.3.2 Hambatan Partisipasi Masyarakat.....	<i>13</i>
2.3.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat	<i>13</i>
2.4 Tinjauan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan.....	<i>13</i>
2.4.1 Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan	<i>13</i>
2.4.2 Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	<i>14</i>
2.5 Landasan Teori.....	<i>14</i>
2.5.1 Teori Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik.....	<i>14</i>
2.5.2 Model Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik	<i>15</i>
2.5.3 Aplikasi Teori Implementasi Kebijakan dalam Konteks DLH Kota Bandar Lampung.....	<i>15</i>
2.6 Kerangka Berpikir	<i>16</i>
BAB III METODE PENELITIAN.....	<i>18</i>
3.1 Tipe Penelitian	<i>18</i>
3.2 Fokus Penelitian	<i>19</i>
3.3 Lokasi Penelitian	<i>20</i>
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	<i>21</i>
3.5 Teknik Pengumpulan Data	<i>21</i>
3.6 Teknik Analisis Data	<i>22</i>

3.7 Teknik Keabsahan Data.....	23
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menghadapi masalah pengelolaan lingkungan hidup karena pertumbuhan kota dan aktivitas manusia. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program lingkungan hidup masih rendah. Hanya sekitar 25 hingga 30 persen warga yang terlibat secara aktif dalam kegiatan seperti pengelolaan limbah, penghijauan, dan kampanye pengurangan sampah. Misalnya, observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak orang masih membuang sampah sembarangan di sungai Way Kuripan di Kelurahan Sukarame, yang menyebabkan banjir dan pencemaran air. Ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan. Menurut survei awal yang dilakukan oleh DLH, 60% responden tidak memahami posisi mereka dalam kebijakan lingkungan publik. Sebagai lembaga pemerintah daerah yang menangani pengelolaan lingkungan, DLH telah berusaha meningkatkan partisipasi melalui sosialisasi dan program pendidikan. Fenomena ini menunjukkan keadaan khusus di Bandar Lampung di mana kebijakan lingkungan publik seringkali gagal mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan menyeluruh untuk memahami fungsi DLH dalam hal ini. Studi serupa di Surakarta menunjukkan bahwa "rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah masalah umum di kota-kota Indonesia, sering karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya pemerintah yang terbatas" (Setyawan & Nugroho, 2018). Ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya masalah di Bandar Lampung.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung telah menerapkan berbagai program sosialisasi dan

pendidikan. Namun, anggaran terbatas dan koordinasi antar-stakeholder membatasi kinerjanya. Misalnya, program "Bandar Lampung Bersih", yang dimulai sejak 2020, hanya mencapai 40% target partisipasi karena tidak ada dukungan dari masyarakat akar rumput, di mana banyak warga lebih memprioritaskan bisnis daripada lingkungan. Menurut data yang dikumpulkan oleh DLH, hanya lima belas persen dari anggaran tahunan sekitar lima puluh miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan partisipasi masyarakat. Angka ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kecamatan. Selain itu, kendala seperti kurangnya akses ke informasi di daerah pinggiran kota membuat situasi menjadi lebih buruk karena masyarakat sering kali tidak memiliki kesempatan untuk sosialisasi langsung. Menurut penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, "organisasi lingkungan di kota-kota Indonesia menghadapi tantangan dalam melibatkan komunitas karena tidak cukup dana dan koordinasi" (Sari & Putra, 2020). Hal ini sejalan dengan pengalaman yang dialami oleh Departemen Lingkungan Hidup Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi DLH tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi. Namun, untuk mengatasi perbedaan antara praktik lapangan dan kebijakan, penerapan fungsi ini masih perlu diperbaiki.

Tidak hanya kurangnya partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung karena kesadaran individu saja, tetapi juga karena desain kebijakan publik yang tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Misalnya, Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup seringkali diterapkan secara top-down tanpa mekanisme umpan balik masyarakat, yang menyebabkan program seperti pengelolaan sampah tidak mencapai sasarannya. Pencemaran sungai, yang berdampak pada ekosistem lokal dan kesehatan warga, adalah salah satu risiko lingkungan yang meningkat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara DLH dapat meningkatkan partisipasi dengan menggunakan metode kualitatif, dengan penekanan khusus pada pengalaman tertentu di Bandar Lampung.

Kebijakan publik lingkungan Kota Bandar Lampung mencoba mengintegrasikan fungsi DLH dengan partisipasi masyarakat. Ini terjadi setelah kasus spesifik di Kelurahan Sukarame dan kendala partisipasi masyarakat. Sebagai dasar, Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan DLH untuk menerapkan program partisipasi seperti pengelolaan sampah terpadu dan kampanye "Go Green Bandar Lampung". Namun, kebijakan ini seringkali tidak dilaksanakan sampai tahap sosialisasi formal karena tidak ada mekanisme partisipasi aktif seperti forum warga atau survei umpan balik. Menurut data DLH, hanya 35% program partisipasi mencapai target sejak 2019. Ketidakkoordinasian antara DLH, kecamatan, dan kelurahan adalah kendala utama. Ini mencerminkan situasi lokal di Bandar Lampung, di mana pendekatan top-down pada kebijakan publik masih berlaku, membuat masyarakat merasa sebagai objek kebijakan daripada subjek. Di sisi lain, penelitian telah menunjukkan bahwa "komunitas terlibat dalam kebijakan lingkungan masih rendah di wilayah kota Indonesia, menghambat pengendalian polusi yang efektif" (Widodo & Suryanto, 2019), menunjukkan bahwa Bandar Lampung bukan satu-satunya kota di Indonesia dalam hal ini.

Indonesia menghadapi masalah serupa di tingkat nasional dalam hal partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan, terutama di kota-kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi seperti Bandar Lampung. Pemerintah daerah diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi, tetapi kendala seperti kekurangan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi masalah utama. Misalnya, program serupa dengan Bandar Lampung juga gagal di Jakarta dan Surabaya. Ini karena masyarakat lebih tertarik pada masalah ekonomi daripada masalah lingkungan.

Kontekstual lokal Bandar Lampung dan perbedaan dengan Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan publik harus lebih adaptif. DLH harus mengadopsi model yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan, seperti kelompok fokus atau aplikasi

digital untuk pendidikan, jika desain kebijakan menghasilkan partisipasi masyarakat yang rendah. Ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja program tetapi juga akan menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Studi nasional menunjukkan bahwa kota-kota yang sukses, seperti Bali dengan program "Desa Adat", memasukkan budaya lokal ke dalam kebijakan mereka. Bandar Lampung dapat mengambil contoh dari praktik ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana DLH dapat mengubah hambatan ini menjadi peluang. Penelitian ini akan berfokus pada pengalaman khusus di Bandar Lampung, menggunakannya sebagai dasar untuk memahami dinamika kebijakan publik Indonesia secara keseluruhan. Menurut Widodo dan Suryanto (2019) dan Resosudarmo dan Jotzo (2019)

Penelitian ini memperluas analisisnya ke konsep umum partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, mulai dari konteks khusus Kota Bandar Lampung, di mana partisipasi masyarakat rendah meskipun ada upaya dari DLH. Kerangka kerja untuk memahami tingkat keterlibatan disediakan oleh model tangga partisipasi warga yang dikembangkan oleh Arnstein (1969). Model ini menempatkan manipulasi pada tingkat terendah dan kekuasaan warga pada tingkat tertinggi. Dalam situasi seperti ini, program DLH Bandar Lampung seringkali terbatas pada informasi atau konsultasi, di mana masyarakat hanya diberi tahu tanpa kuasa nyata untuk membuat keputusan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa partisipasi efektif memerlukan mekanisme yang memberdayakan masyarakat, seperti forum dialog atau pengambilan keputusan bersama. Studi terkini menegaskan bahwa "effective environmental policy requires active community participation, yet in Indonesian cities, this is often undermined by resource constraints" (Chong & Tan, 2021, p. 89), yang menunjukkan bahwa model Arnstein masih relevan untuk menganalisis hambatan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan model ini untuk mengevaluasi bagaimana DLH dapat naikan partisipasi dari tingkat rendah ke tinggi, berkontribusi pada pemahaman umum tentang governance lingkungan.

Analisis lebih lanjut tentang teori kebijakan publik menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara eksekusi kebijakan dan desain kebijakan di lapangan sering menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di Indonesia. Menurut teori implementasi kebijakan yang dibuat oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), elemen seperti dukungan sumber daya, koordinasi antar-aktor, dan umpan balik masyarakat sangat penting. Di Bandar Lampung, Perda No. 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan alokasi anggaran menyebabkan program partisipasi tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan urbanisasi di Asia Tenggara, literatur menunjukkan bahwa masyarakat harus berperan sebagai penyedia dan penerima manfaat dalam kebijakan lingkungan publik (Resosudarmo & Jotzo, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi DLH yang dapat meningkatkan implementasi, seperti bekerja sama dengan NGO atau menggunakan teknologi digital. Ini akan mendorong diskusi tentang kebijakan publik yang responsif di negara berkembang.

Dengan menggunakan pendekatan induktif dari kasus khusus Bandar Lampung ke konsep umum, penelitian ini mengisi celah dalam literatur tentang keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik lingkungan Indonesia. Studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada kota besar seperti Jakarta atau Yogyakarta (Sari & Putra, 2020), tetapi sedikit yang menggunakan metode kualitatif mendalam untuk mempelajari wilayah seperti Bandar Lampung. Penelitian ini dapat menghasilkan model yang relevan untuk meningkatkan peran DLH dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan dan teori partisipasi (Arnstein, 1969). Ini sesuai dengan tren global di mana partisipasi masyarakat dianggap penting untuk keberhasilan kebijakan lingkungan (Widodo & Suryanto, 2019). Terakhir, hasil ini akan meningkatkan pemahaman umum tentang cara-cara di mana kebijakan publik dapat diterapkan dengan lebih baik di Indonesia. Mereka juga akan memberikan saran praktis untuk pemerintah daerah.

Dalam konteks kebijakan publik Indonesia, penelitian ini memiliki justifikasi penting karena keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih menjadi masalah utama di tingkat daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi perbedaan antara teori partisipasi dan praktik implementasi dengan menemukan strategi yang berhasil yang dapat diterapkan di kota-kota lain, dengan mengutamakan peran DLH di Bandar Lampung. Di Indonesia, penelitian telah menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali gagal karena keterlibatan masyarakat yang rendah, yang menghambat pembangunan berkelanjutan (Sari & Putra, 2020). Sebuah contohnya adalah penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, yang menemukan bahwa "agen lingkungan lokal di kota-kota Indonesia menghadapi tantangan dalam melibatkan masyarakat karena keterbatasan pendanaan dan koordinasi" (Sari & Putra, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini akan membantu reformasi kebijakan publik dan mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, alasan ini membawa kita ke metodologi penelitian. Di Bandar Lampung, data akan dikumpulkan melalui pendekatan kualitatif melalui observasi partisipan, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Metode ini sesuai dengan pendekatan induktif, yang memungkinkan teori dibuat berdasarkan data empiris (Creswell, 2014). Penelitian ini akan menghasilkan saran praktis untuk meningkatkan partisipasi dengan berfokus pada pengalaman khusus DLH dan masyarakat. Ini mengikuti tren di Indonesia, di mana penelitian kualitatif menjadi lebih populer untuk memahami kebijakan publik (Chong & Tan, 2021). Latar belakang ini telah memberikan dasar untuk eksplorasi lebih lanjut melalui teknik yang ketat, seperti yang ditunjukkan oleh transisi ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung, seperti yang tercermin dalam data DLH 2022 (hanya 25-30% keterlibatan aktif), mempengaruhi efektivitas kebijakan publik

lingkungan, dan apa peran DLH dalam mengatasi hambatan tersebut untuk mendorong pembangunan berkelanjutan?

2. Dalam konteks studi kualitatif, apa strategi yang dapat diterapkan oleh DLH Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme kebijakan publik yang lebih inklusif, mengingat tantangan seperti kurangnya kesadaran, anggaran terbatas, dan pendekatan top-down yang masih dominan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kebijakan publik, dengan tujuan mengidentifikasi hambatan dan strategi efektif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.
2. Menggali pengalaman dan perspektif masyarakat serta DLH terkait tingkat partisipasi dalam program lingkungan hidup, seperti kampanye pengurangan sampah dan penghijauan, untuk memahami dinamika kebijakan publik di Bandar Lampung.
3. Mengembangkan rekomendasi praktis bagi DLH dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif, berdasarkan data kualitatif dari wawancara dan observasi, yang dapat berkontribusi pada model partisipasi masyarakat di kota-kota Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya literatur partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik lingkungan di Indonesia, khususnya melalui integrasi model partisipasi Arnstein (1969) dan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983), serta mengisi gap penelitian kualitatif di daerah seperti Bandar Lampung. Secara praktis, hasilnya akan menghasilkan rekomendasi bagi DLH Kota Bandar Lampung dan pemerintah daerah lain untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif, seperti mekanisme partisipasi aktif, guna mengatasi hambatan anggaran dan koordinasi. Sosialnya, penelitian ini mendorong kesadaran

masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam program lingkungan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, pengurangan risiko lingkungan seperti pencemaran sungai, dan penguatan good governance di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putra, B., 2021	<i>Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Kebijakan Lingkungan Hidup: Studi Kualitatif di Kota Metro Lampung</i>	Studi ini mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah (termasuk DLH) dalam kebijakan lingkungan hidup di Kota Metro Lampung (dekat Bandar Lampung) efektif jika melibatkan masyarakat melalui kampanye edukasi, namun hambatan seperti anggaran terbatas dan koordinasi antar-stakeholder masih menghambat partisipasi. Dengan analisis wawancara dan observasi, hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui model kebijakan publik yang lebih partisipatif, memberikan wawasan untuk konteks Bandar Lampung yang serupa.
2.	Rahman, T., 2021	<i>Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar</i>	Penelitian oleh Rahman (2022) menemukan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui

		<i>Lampung dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Publik: Pendekatan Kualitatif</i>	kebijakan publik efektif melalui program edukasi dan kampanye lingkungan, namun partisipasi masyarakat masih rendah akibat pendekatan top-down yang dominan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi, hasil menunjukkan bahwa kebijakan publik perlu lebih inklusif, seperti melibatkan mekanisme umpan balik dari masyarakat, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan dan mengatasi hambatan seperti kurangnya kesadaran dan anggaran terbatas. Temuan ini mendorong reformasi kebijakan yang lebih partisipatif, memberikan wawasan bagi penelitian serupa di daerah urban Indonesia.
3.	Viki Andrian, Sri Wilujeng, Niko Pahlevi Hentika, 2025	<i>Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Pengelolaan</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi berperan penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembina dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan pengelolaan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan pelatihan daur ulang. Program ini berhasil meningkatkan

		<i>Sampah di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi</i>	kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan, namun partisipasi belum merata karena terkendala sarana, anggaran, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Secara keseluruhan, peran aktif DLH berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, meski perlu dukungan dan koordinasi yang lebih kuat agar program berkelanjutan.
--	--	--	--

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan atau program yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah sosial dan mencapai tujuan bersama, baik dengan melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, termasuk kerangka hukum, peraturan, dan anggaran yang dibuat untuk menangani masalah seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan publik juga mencakup proses penetapan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Berikut pengertian kebijakan publik menurut para ahli;

1. Thomas R. Dye, Apa yang pemerintah memilih untuk melakukan atau tidak melakukan" adalah definisi yang menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup keputusan aktif pemerintah tentang bagaimana memberikan sumber daya atau mengontrol perilaku masyarakat.
2. Anderson,"tindakan pemerintah yang dirancang untuk mengatasi masalah publik, yang melibatkan pilihan antara alternatif tindakan atau

ketidaktindakan" adalah definisi kebijakan publik. Definisi ini menunjukkan aspek proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.

3. Dwiyanto (2008), "proses dan hasil kegiatan pemerintah dalam mengatasi masalah publik melalui pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor" adalah definisi kebijakan publik di Indonesia. Ini terkait dengan konteks lokal seperti Bandar Lampung, di mana kebijakan publik mengharuskan masyarakat berpartisipasi.

2.2.2 Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik untuk kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut: mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat; memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri melainkan melalui tindakan kolektif; memperbaiki hubungan intrasosial individu atau kelompok yang terganggu oleh faktor internal-personal yang tidak sehat; dan meningkatkan hubungan intrasosial individu atau kelompok.

2.3 Tinjauan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik merupakan elemen kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, terutama dalam konteks pengelolaan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kota Bandar Lampung.

2.3.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dan tidak pasif warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Partisipasi adalah "tangga kekuasaan" di mana masyarakat naik dari tingkat manipulasi (terendah) hingga kekuasaan warga (tertinggi), memberikan kontrol nyata atas kebijakan, menurut Arnstein (1969). Partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai "proses keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama" dalam konteks Indonesia (Dwiyanto, 2008).

2.3.2 Hambatan Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik sangat penting, seringkali ada tantangan struktural dan kultural yang menghalanginya. Pendekatan top-down yang dominan, keterbatasan anggaran pemerintah untuk program pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan adalah hambatan utama. Menurut Widodo dan Suryanto (2019), hanya 40% masyarakat aktif terlibat dalam partisipasi di kota-kota Indonesia karena hambatan seperti koordinasi antar-stakeholder yang lemah dan urbanisasi cepat. Di Bandar Lampung, pembuangan sampah sembarangan di sungai Way Kuripan menunjukkan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam kebijakan pengelolaan limbah. Penelitian ini berfokus pada hambatan ini dan bagaimana DLH harus mengatasi masalah ini untuk meningkatkan partisipasi.

2.3.3 Manfaat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dengan cara-cara seperti peningkatan kepatuhan, inovasi solusi, dan keberlanjutan program. Selain itu, kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, mengurangi resistensi, dan memperoleh legitimasi. Sari dan Putra (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program lingkungan di Yogyakarta meningkatkan efektivitas pengurangan sampah hingga 35% karena masyarakat merasa bertanggung jawab atas keputusan. Manfaat ini dapat dicapai di Bandar Lampung jika DLH mendorong partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti forum warga, yang akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko lingkungan seperti banjir.

2.4 Tinjauan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan

2.4.1 Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah bertanggung jawab atas

pengelolaan lingkungan lokal melalui Departemen Lingkungan Hidup dan Hortikultura (DLH). Fokus utama adalah regulasi (membuat peraturan seperti Perda pengelolaan sampah), edukasi (membuat kampanye kesadaran lingkungan), dan koordinasi (berkolaborasi dengan komunitas dan NGO). Menurut Dwiyanto (2008), pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemerintahan lingkungan. Dalam peran ini, DLH harus mendorong partisipasi masyarakat untuk keberhasilan kebijakan. Di Indonesia, program seperti "Go Green" diselenggarakan di berbagai kota untuk mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengurangan limbah.

2.4.2 Strategi Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk mengatasi tantangan, pemerintah daerah dapat menerapkan strategi seperti penguatan mekanisme partisipasi (forum warga, aplikasi digital), alokasi anggaran untuk edukasi, dan kolaborasi dengan masyarakat. Sari dan Putra (2020) menyarankan bahwa DLH di Yogyakarta berhasil meningkatkan partisipasi melalui kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, menghasilkan peningkatan efektivitas program hingga 35%. Di Bandar Lampung, strategi ini dapat diterapkan melalui kebijakan publik yang mendorong partnership antara DLH dan masyarakat, seperti program pengelolaan sampah terpadu.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik

Grand theory dalam administrasi publik merujuk pada teori makro yang menjelaskan sistem kebijakan publik secara keseluruhan; contohnya adalah teori pemerintahan yang menekankan hubungan antara aktor pemerintah, masyarakat, dan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini relevan dengan penelitian ini karena kebijakan publik lingkungan memerlukan governance yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, teori governance menekankan betapa pentingnya bekerja sama untuk memecahkan masalah lingkungan di tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, Dwiyanto (2008)

mengatakan bahwa "governance dalam administrasi publik melibatkan mekanisme kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan berkelanjutan" yang mendukung pemahaman kami tentang peran DLH sebagai fasilitator partisipasi. Teori ini memberikan fondasi umum bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk efektivitas karena kebijakan publik dibuat secara bottom-up dan top-down.

2.5.2 Model Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Teori menengah yang lebih spesifik, seperti model tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein (1969), dibuat dalam konteks administrasi publik untuk mengukur seberapa terlibat masyarakat dalam kebijakan. Model ini terdiri dari tingkatan mulai dari manipulasi hingga kekuasaan warga, dan itu relevan dengan penelitian ini karena membantu menganalisis bagaimana DLH dapat meningkatkan partisipasi dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Model ini sering digunakan dalam kebijakan lingkungan di Indonesia untuk meningkatkan inklusi. Menurut Thoha (2008), "partisipasi masyarakat dalam administrasi publik dapat ditingkatkan melalui model yang memberdayakan warga, sehingga kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal" menunjukkan bahwa teori tengah ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif program DLH, seperti kampanye pengurangan sampah yang menuntut partisipasi masyarakat yang aktif.

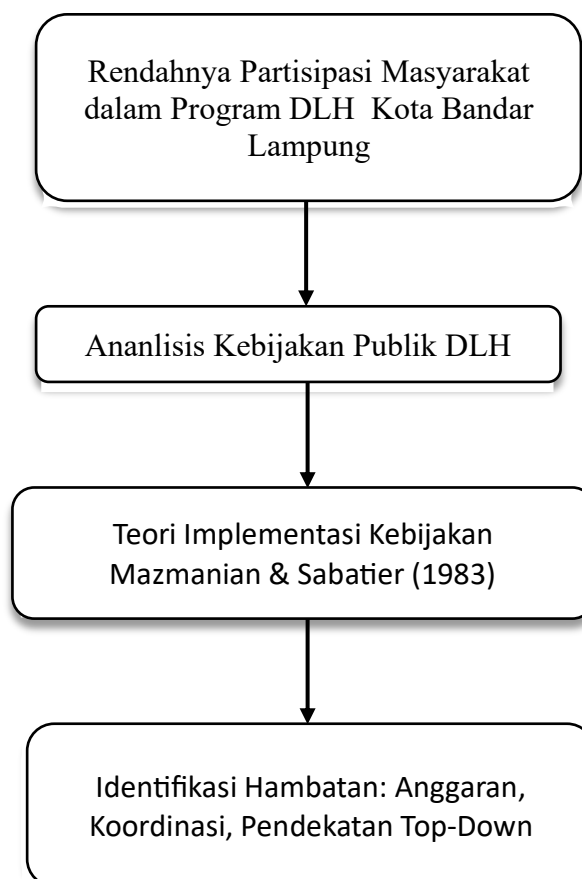
2.5.3 Aplikasi Teori Implementasi Kebijakan dalam Konteks DLH Kota Bandar Lampung

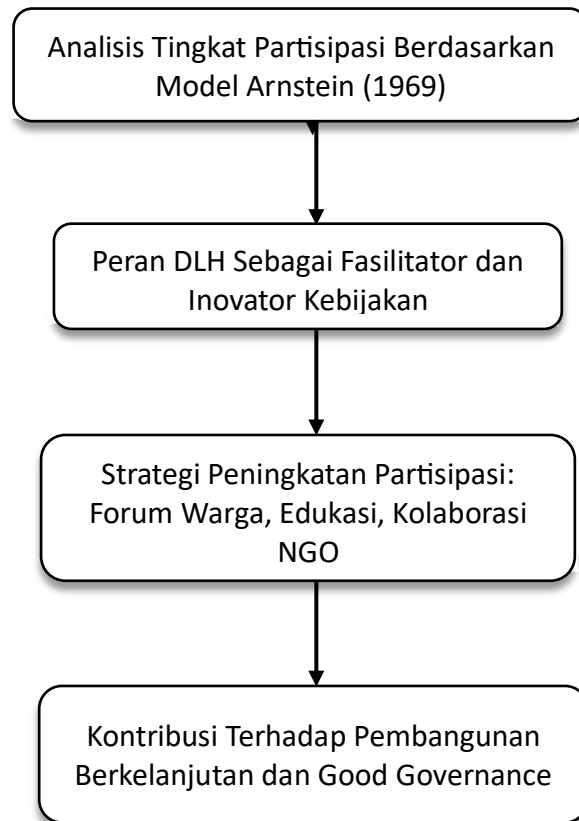
Teori yang diterapkan digunakan secara langsung dalam konteks penelitian tertentu. Salah satu contohnya adalah teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menekankan aspek-aspek seperti umpan balik, koordinasi, dan sumber daya dalam eksekusi kebijakan. Teori ini digunakan di DLH Kota Bandar Lampung untuk melihat tantangan partisipasi masyarakat seperti anggaran terbatas dan pendekatan top-down, serta rencana untuk meningkatkannya melalui mekanisme inklusif. Teori ini sering digunakan dalam penelitian kebijakan publik lokal di Indonesia. Misalnya, dalam buku Dwiyanto

(2010) disebutkan bahwa "implementasi kebijakan publik di tingkat daerah memerlukan dukungan sumber daya dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi tantangan seperti urbanisasi" Hal ini langsung berkaitan dengan peran DLH dalam program lingkungan di Bandar Lampung, di mana partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui reformasi kebijakan yang lebih aktif.

2.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada hubungan logis antara konsep-konsep utama yang digunakan untuk memahami fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan lingkungan publik. Studi ini melihat kebijakan publik sebagai alat pemerintah daerah untuk mengatasi masalah lingkungan dengan melibatkan masyarakat. Namun, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran yang terbatas, koordinasi antar-stakeholder, dan pendekatan top-down yang masih dominan.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang dipilih karena sesuai dengan tujuan eksploratif dan mendalam terhadap fenomena sosial seperti partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Tipe penelitian kualitatif menekankan pemahaman subjektif dan konteks spesifik, bukan generalisasi statistik, sehingga cocok untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kota Bandar Lampung. Studi kasus memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap satu kasus tertentu (DLH dan partisipasi masyarakat) dalam lingkungan alami tanpa kontrol eksperimental. Studi kasus digunakan jika tujuan penelitian adalah untuk memahami "bagaimana" dan "mengapa" fenomena terjadi, dengan penekanan pada proses dan interaksi, seperti yang dinyatakan Yin (2018). Studi kasus membantu mengungkap dinamika partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan DLH, seperti hambatan anggaran dan strategi pendidikan, dalam konteks ini.

Pendekatan ini didukung oleh Creswell (2014), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif "bertujuan untuk mengeksplorasi makna yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka" sehingga relevan dengan analisis perspektif masyarakat dan pejabat DLH. Di Indonesia, tipe ini sering digunakan dalam studi kebijakan publik untuk mendapatkan wawasan lokal, seperti yang dilakukan dalam penelitian partisipasi masyarakat di kota-kota seperti Yogyakarta (Sari & Putra, 2020).

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dengan menekankan analisis subjektif, kontekstual, dan prosedural. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "bagaimana" dan "mengapa" DLH dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks lokal Bandar Lampung. Tidak ada generalisasi statistik dalam penelitian ini. Studi sebelumnya menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah di kota-kota Indonesia (Widodo & Suryanto, 2019), jadi penelitian ini melengkapi kekurangan studi kasus spesifik. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama:

1. Peran DLH dalam Kebijakan Publik, Mengkaji bagaimana DLH menciptakan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan lingkungan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini termasuk membuat peraturan (seperti Perda No. 5 Tahun 2019), mengajar (seperti kampanye "Go Green"), dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Sejauh mana pendekatan DLH lebih top-down atau bottom-up, dan bagaimana hal itu mempengaruhi partisipasi, adalah fokus utama.
2. Dinamika Partisipasi Masyarakat, Menganalisis tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan model Arnstein (1969), mulai dari manipulasi hingga kekuasaan warga. Fokus meliputi hambatan seperti kurangnya kesadaran, anggaran terbatas, dan urbanisasi (seperti di Kelurahan Sukarame), serta manfaat partisipasi seperti peningkatan efektivitas program pengelolaan sampah. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman subjektif masyarakat dan pejabat DLH untuk memahami motivasi dan resistensi partisipasi.
3. Implikasi Kebijakan Publik dikonteks Global, bagaimana kebijakan publik DLH berhubungan dengan konteks khusus Kota Bandar Lampung, termasuk masalah seperti pembuangan sampah sembarangan di sungai Way Kuripan dan tingkat partisipasi yang rendah (antara 25 dan 30 persen, menurut DLH 2022). Di antara langkah-langkah yang disarankan untuk meningkatkan partisipasi adalah contoh mekanisme inklusif yang dapat diterapkan di kota lain.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, karena relevansinya dengan judul penelitian: peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi dengan populasi sekitar 1,2 juta orang (BPS Lampung, 2022), menghadapi tantangan lingkungan seperti urbanisasi cepat, pembuangan sampah sembarangan, dan pencemaran sungai. Data awal dari DLH Kota Bandar Lampung tahun 2022 menunjukkan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan hanya antara 25 dan 30 persen. Lokasi ini ideal untuk studi kasus kualitatif yang melihat dinamika partisipasi masyarakat dalam program lingkungan. Secara khusus, penelitian berfokus pada DLH sebagai lembaga utama dan kelurahan seperti Sukarame sebagai lokasi praktik, di mana banjir akibat sampah di sungai Way Kuripan menjadi contoh masalah lingkungan. Relevansi dengan topik (partisipasi masyarakat rendah), aksesibilitas data (laporan DLH), dan kemungkinan wawasan mendalam adalah kriteria yang digunakan untuk memilih lokasi. Sesuai dengan metodologi kualitatif yang menekankan konteks lokal, lokasi ini memungkinkan pengamatan langsung hubungan antara DLH dan masyarakat. Penelitian, yang mencakup pengumpulan dan analisis data di lapangan, berlangsung selama enam bulan (Januari hingga Juni 2023). Penelitian ini mengisi kelangkaan literatur karena Bandar Lampung jarang menjadi subjek studi partisipasi masyarakat dibandingkan kota besar seperti Jakarta.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Wawancara mendalam dengan pejabat atau staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, serta masyarakat dan individu lain yang terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Tujuan dari data primer ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung tentang peran DLH dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui implementasi berbagai program dan kebijakan.

Data sekunder, di sisi lain, diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup, peraturan daerah, laporan tahunan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan situs web resmi pemerintah. Data sekunder digunakan untuk mendukung temuan lapangan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan lingkungan hidup publik Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, dengan tujuan memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Wawancara, Informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup diwawancarai secara menyeluruh. Orang-orang yang disebutkan di sini termasuk orang yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, tokoh masyarakat, kelompok nirlaba lingkungan, dan individu yang terlibat dalam inisiatif pelestarian lingkungan. Tujuan wawancara ini

adalah untuk mendapatkan informasi tentang jenis kebijakan, taktik, dan tantangan yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Observasi, Di lapangan, observasi langsung dilakukan untuk mengamati aktivitas dan program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama masyarakat, seperti kegiatan gotong royong, pengelolaan sampah, dan program penghijauan. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat terjadi dan bagaimana DLH berperan aktif dalam mendukung kegiatan tersebut.
3. Dokumentasi, Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Ini termasuk dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan daerah, foto kegiatan, dan arsip kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup Kota Bandar Lampung. Metode ini membantu peneliti menyempurnakan dan memverifikasi informasi yang mereka peroleh dari observasi dan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu proses mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Analisis data dilakukan secara bertahap berdasarkan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Pada titik ini, data lapangan dipilih, dikonsentrasikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti memilih data yang relevan dengan topik, yaitu tentang kebijakan dan pendekatan DLH untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kemudian, data dikelompokkan menurut tema tertentu.

2. Penyajian Data

Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun dan disajikan dalam bentuk matriks, tabel, atau uraian naratif untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Tujuan penyajian data ini adalah untuk membantu peneliti menemukan hubungan antar kategori dan menemukan pola atau kecenderungan yang muncul dari temuan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari penelitian mereka. Kesimpulan yang dibuat hanyalah sementara dan dapat berubah saat ada data baru. Setelah verifikasi selesai, kesimpulan akhir dibuat untuk menjawab topik penelitian, yaitu bagaimana Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan ketiga tahapan analisis tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran, strategi, dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan lingkungan publik.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik menurut Sugiyono (2019) dan Moleong (2017), yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi, Triangulasi dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan seperti staf Dinas Lingkungan Hidup, tokoh masyarakat, LSM lingkungan, dan warga yang berpartisipasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menilai kesesuaian data yang diperoleh.

2. Peningkatan Ketekunan, Peneliti melakukan pengamatan mendalam dan berulang di lapangan untuk memahami konteks peran Dinas Lingkungan Hidup. Agar hasilnya konsisten dan dapat dipercaya, upaya ini dilakukan dengan membaca berbagai sumber dan terus memeriksa data.
3. Diskusi dengan Rekan Sejawat, Peneliti mendiskusikan hasil temuan sementara dengan rekan sejawat atau dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan menghindari bias subjektif. Diskusi ini membantu peneliti melihat data dari berbagai sudut pandang.
4. *Member Check*, *Member check* mengonfirmasi hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan peneliti sesuai dengan tujuan dan pengalaman informan yang bekerja di lapangan. Dengan menggunakan keempat metode ini, diharapkan data penelitian ini akan memberikan gambaran yang akurat tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (1975). *Public policy-making*. Holt, Rinehart and Winston.
- Andrian, V., Wilujeng, S., & Hentika, N. P. (2025). PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI. *KATARSIS*, 3(1), 16-27.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- BPS Lampung. (2022). *Statistik Daerah Kota Bandar Lampung 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Chong, J., & Tan, Y. S. (Eds.). (2021). *Environmental governance in Southeast Asia: Institutions, actors, and processes*. ISEAS Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2008). *Governance dalam administrasi publik: Konsep dan aplikasi*. Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, A. (2010). *Reformasi birokrasi dan kebijakan publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Friedrich, C. J. (1963). *Man and his government: An empirical theory of politics*. McGraw-Hill.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Putra, B. (2021). *Peran pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat pada kebijakan lingkungan hidup: Studi kualitatif di Kota Metro Lampung* [Skripsi, Universitas Lampung]
- Rahman, T. (2022). *Analisis peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui kebijakan publik: Pendekatan kualitatif* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Resosudarmo, B. P., & Jotzo, F. (Eds.). (2019). *The economics of climate change in Southeast Asia: A regional review*. Routledge.
- Sari, D. P., & Putra, I. G. N. (2020). The role of local environmental agencies in promoting community participation: Evidence from Yogyakarta City. *Sustainability*, 12(15), 6123.
- Setyawan, A., & Nugroho, B. (2018). Community participation in urban waste management: A case study in Surakarta City, Indonesia. *Journal of Environmental Management*, 215, 42-52.
- Thoha, M. (2008). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Rajawali Pers.
- Widodo, T., & Suryanto, A. (2019). Public participation in environmental policy: Challenges in Indonesian cities. *Environmental Science & Policy*, 101, 75-84.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.